

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kontribusi besar telah diberikan oleh perusahaan manufaktur terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan dan perkembangan industri manufaktur saat ini menyebabkan semakin pesatnya laju perekonomian. Di Indonesia perkembangan industri manufaktur cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun ke tahun semakin bertambah, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan prospeknya menguntungkan. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Syarif Hidayat mengatakan bahwa Kinerja industri manufaktur sepanjang 2015 mencapai Rp2.097,71 triliun atau berkontribusi 18,1% terhadap PDB nasional (www.kepemenperin.go.id)

Persaingan dalam industri manufaktur membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan dengan mengoptimalkan alokasi atau penggunaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan laba melalui Laporan keuangan. Penilaian kondisi keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga diperoleh informasi yang berguna bagi pihak *internal* dan pihak *eksternal* perusahaan dalam

rangka pengambilan keputusan. Penyampaian informasi melalui laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi dana mereka.

Seperti dinyatakan dalam kerangka konseptual *Financial Accounting Standards Board* (FASB) bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Informasi ini juga diharapkan menjadi pedoman untuk pemegang saham dan investor potensial untuk menentukan kepentingan investasi mereka terhadap saham emiten. Dalam menyusun laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam menentukan metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan *Standar Akuntansi Keuangan* yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan yang ada, seringkali perhatian pengguna laporan keuangan hanya ditujukan kepada informasi laba, tanpa memperhatikan bagaimana laba tersebut dihasilkan. Hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan beberapa tindakan yang disebut manajemen atas laba (*earning management*).

Adanya fleksibilitas yang senantiasa terbuka dalam implementasi Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*)

menyebabkan manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi dari berbagai pilihan kebijakan yang ada, sehingga pada gilirannya *fleksibilitas* tersebut memungkinkan dilakukannya pengelolaan laba (*earning management*). Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses laporan keuangan eksternal dengan sengaja memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

Pada laporan keuangan, tindakan perataan laba dapat mengakibatkan informasi yang diungkap menjadi menyesatkan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, khususnya pihak eksternal. Praktik perataan laba tidak akan terjadi jika laba yang diharapkan tidak terlalu berbeda dengan laba yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa laba merupakan sesuatu yang paling dipertimbangkan oleh investor untuk menentukan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Oleh sebab itu, manajer berusaha memberikan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan dan kualitas manajemen di mata investor. (Pujiarti, 2015).

Perusahaan akan melakukan kebijakan akuntansi sesuai keinginannya dan melakukan tindakan rekayasa yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Manajemen laba merupakan perilaku manajemen dalam mengatur laba perusahaannya atau disebut sebagai suatu tindakan memberikan informasi mengenai laba yang tidak sebenarnya pada perusahaan dan tindakan tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Menurut Schipper (1998) dalam Agustia (2013) manajemen laba adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajemen meratakan, menaikkan ataupun menurunkan laba, hal ini karena

dalam penyusunan laporan keuangan yang ditujukan untuk para pemegang saham turut melibatkan manajer di dalam berjalannya proses. Manajemen laba dilakukan untuk memperoleh tujuan yaitu memengaruhi keputusan pelaku pasar modal, mendapatkan bonus atau kompensasi, dan menghindari pelanggaran perjanjian utang. Dengan adanya pemilihan kebijakan akuntansi tertentu yang dilakukan oleh manajer maka perusahaan akan mencapai tujuan yang diinginkan. Namun tindakan tersebut akan mengurangi kredibilitas laporan keuangan karena menimbulkan informasi tidak relevan dan akan menyebabkan kerugian bagi *stakeholder*. Dengan adanya hubungan agensi antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemegang saham) akan terdapat kemungkinan timbulnya manajemen laba. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan, dalam teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pihak yang memberi wewenang (pemilik saham) dan menerima wewenang (manajer), selain itu kontrak antara *principal* (pemilik saham) yang memberikan wewenang kepada *agent* (manajer atau pengelola perusahaan) digunakan untuk membuat keputusan terbaik. Namun untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, *agent* diduga akan mengoperasikan perusahaan sesuai keinginannya, hal ini akan bertentangan dengan tujuan para *principal*.

Beberapa fenomena mengenai manajemen laba yang terjadi pada beberapa perusahaan besar. Contoh fenomena manajemen laba yaitu pada tahun 2005 PT Inovisi Infracom dengan kode perusahaan INVS diindikasikan melakukan tindakan salah saji materi pada laporan keuangan. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan untuk periode september 2014 yang kemudian didesak oleh BEI melakukan keterbukaan informasi INVS pada tanggal 25

Februari 2015, ada delapan item dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. Di samping itu, BEI juga menyatakan manajemen INVS salah saji item pembayaran gaji karyawan di mana perusahaan hanya menyajikan Rp 59 miliar saja pada Q3 tetapi pada Q2 disajikan sebesar Rp 1,9 Triliun. Perubahan yang dilakukan oleh INVS adalah menurunkan nilai aset tetap dari Rp 1,45 Triliun menjadi Rp 1,16 Triliun, Laba bersih per saham pada periode berjalan juga diakui oleh perusahaan yang menjadikan laba bersih per saham menjadi lebih tinggi yang seharusnya di distribusikan kepada pemilik entitas induk (Sumber: www.bareksa.com)

Kaitan antara *corporate governance* terhadap manajemen laba adalah bahwa perusahaan dengan *corporate governance* yang baik akan memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*, dan terciptanya suatu pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *corporate governance*. Sehingga dengan penerapan *corporate governance* maka dapat meminimalisasi atau memberikan batasan pada manajemen untuk tidak melakukan praktik manajemen laba, dengan mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap operasional perusahaan.

Ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang dianggap dapat memengaruhi manajemen laba seperti keberadaan dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial .

Dewan Komisaris adalah suatu manajemen kepengurusan dari suatu perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direktur

suatu perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Dewan Komisaris ditunjuk oleh [RUPS](#) dan dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Sedangkan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Persyaratan wajib sebagai komisaris independen yaitu bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perusahaan tersebut, serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Masing-masing dari perusahaan yang telah tercatat diwajibkan mempunyai minimal 2 orang dewan komisaris yang salah satunya merupakan komisaris independen. Komisaris independen wajib memenuhi kriteria minimal yaitu 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Komisaris independen harus mampu memberikan jaminan terhadap efektivitas pengawasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris Independen harus berlatar pendidikan keuangan atau akuntansi. Faktor yang dapat berpengaruh pada keputusan informasi yang akan disajikan ditentukan oleh komposisi dewan komisaris sehingga adanya dewan komisaris menjadi hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan.

Pengangkatan dewan komisaris dan pemberhentiannya dapat dilakukan melalui persetujuan RUPS yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan komisaris. RUPS berwenang untuk memberikan usulan pengajuan dewan komisaris suatu perusahaan di mana pada perusahaan Syariah dikenal dengan sebutan dewan pengawas Syariah. Dewan pengawas syariah adalah suatu susunan kepengurusan yang harus dimiliki oleh perusahaan yang mendasarkan kegiatannya pada prinsip syariah yang ditunjuk melalui rekomendasi MUI dan RUPS. Komposisi dewan komisaris dinilai memiliki peran yang penting karena dapat berpengaruh pada informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi dapat menentukan laba perusahaan. Selain itu, Dewan komisaris independen juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen laba karena dengan semakin banyaknya anggota komisaris independen maka mekanisme pengawasan akan semakin ketat karena adanya tuntutan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit berwenang untuk melakukan audit terhadap aktivitas manajemen dan auditor eksternal ataupun internal. Komite audit juga memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan atas informasi tambahan dan mendapatkan keterangan dari karyawan dan manajemen yang terkait. Komite audit dapat melakukan evaluasi terhadap sejauh mana perusahaan telah memenuhi standar dan prinsip akuntansi yang telah ditentukan. Komite audit memiliki keterbatasan dalam otoritas eksekusi dalam hal apapun karena komite audit hanya berfungsi sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga kewenangan

dewan komisaris hanya sebatas pemberian rekomendasi kepada dewan komisaris terkecuali untuk sesuatu yang memiliki spesifikasi khusus yang telah dikuasakan oleh RUPS secara eksplisit contohnya penentuan dan pengevaluasian komposisi auditor eksternal dan mengepalai satu instrumen perusahaan yang dapat melakukan investigasi khusus.

Semakin sedikit komite audit, maka kemungkinan dilakukannya tindakan manajemen laba pada laporan keuangan akan semakin besar.. Sebaliknya, jika komite audit beranggotakan lebih banyak, maka akan sulit bagi manajer mencari celah untuk memanipulasi laba pada laporan keuangan. Keberadaan komite audit diharapkan mampu bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas sehingga membuat laporan keuangan menjadi semakin berkualitas.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Dilihat dari sudut pandang teori akuntansi, motivasi para manajer perusahaan menjadi penentu dalam tindakan menjamin laba. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dengan adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer maka manajer akan bertindak selaras dengan kepentingan 5 pemegang saham sehingga dapat memperkecil perilaku oportunistik manajer. Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat, sehingga hal ini akan menjadi motivasi dan dorongan manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Hasil penelitian Larastomo dkk (2016) memperlihatkan jika manajemen laba dipengaruhi oleh komite audit dan komposisi dewan komisaris secara negatif signifikan serta dipengaruhi oleh

kepemilikan manajerial secara positif signifikan. Berbeda dengan penelitian Agustia (2013) memperlihatkan jika manajemen laba tidak dipengaruhi oleh *corporate governance* sebab adanya proporsi dewan komisaris dan komite audit pada suatu perusahaan publik hanya sebatas formalitas untuk memenuhi peraturan yang ada sehingga berapapun jumlah anggota dewan komisaris dan komite audit tidak dapat melakukan pembatasan terhadap manajemen laba pada perusahaan.

Salah satu bentuk lain dari manajemen laba adalah pengurangan pajak (*tax avoidance*). Menurut Rahman, dkk (2013) perusahaan menggunakan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak. Secara konseptual, teori keagenan dan akuntansi positif dapat dikaitkan dengan praktik manajemen laba karena memerlukan sebuah perencanaan. Teori keagenan menjelaskan *principal* (pemerintah) sebagai *fiskus* dan pihak *agent* (manajemen) di mana antara keduanya memiliki perbedaan kepentingan dalam hal pajak yang dibayarkan.

Manajemen perusahaan akan berusaha menekan sekecil mungkin pajak yang dibayarkan kepada pemerintah karena hal tersebut dapat mengurangi kemampuan ekonomi perusahaan tersebut. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan biaya untuk mendanai pengeluaran melalui penerimaan pajak. Hal tersebut dapat menjadikan konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang dapat mendorong agen untuk mengurangi pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada perusahaan. Pada teori akuntansi positif menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Oleh sebab itu di

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik. Dalam memajemen perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan *minimum*, (Pohan, 2013).

Mengacu pada penelitian Larastomo dkk (2016), dimana perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel *Leverage*. Alasan dipilihnya *Leverage* diduga dapat memengaruhi pengelolaan atau manajemen laba. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber dana atau aktiva yang memiliki beban tetap, dengan harapan untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang inilah yang disebut dengan *Leverage*. Salah satu sumber dana perusahaan selain menjual saham di pasar modal adalah melalui sumber dana eksternal berupa utang. Rasio *Leverage* akan menjadi perhatian investor karena rasio *Leverage* mempunyai dampak risiko, apabila rasio *Leverage* kecil maka semakin kecil pula risikonya begitu juga sebaliknya. Perusahaan yang mempunyai utang besar akan cenderung melanggar perjanjian utang dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai utang kecil. Perusahaan menghadapi berbagai kemungkinan jika melanggar utang seperti peningkatan tingkat bunga, percepatan jatuh tempo dan negoisasi masa utang. Perusahaan yang mempunyai utang terlalu besar akan sulit melepaskan beban utang tersebut. Manajer diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utang, selain itu perusahaan akan berusaha

memenuhi perjanjian utang agar mendapat penilaian baik dari kreditor atau investor.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, TAX AVOIDANCE DAN LAVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya sifat *opportunistic* manajemen cenderung menyebabkan terjadinya manajemen laba yang akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Rendahnya kualitas laba dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan kepada para pemakainya seperti para investor dan kreditor sehingga nilai perusahaan akan berkurang.

Berdasarkan teori keagenan, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sehingga perumusan masalah yang akan diuji pada penelitian ini adalah :

1. Apakah dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap manajemen laba?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh-pengaruh berikut :

1. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.
2. Pengaruh komite audit terhadap manajemen laba.
3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
4. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap manajemen laba.
5. Pengaruh *Leverage* terhadap manajemen laba?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini yaitu dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memperoleh wawasan selain itu dapat mempelajari dan memahami tentang *good corporate governance*, *tax avoidance*, dan *Leverage* serta *earning management* (manajemen laba).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Harapan dari penelitian ini yaitu agar perusahaan melakukan pengawasan dan lebih berhati hati dalam mengawasi manajer terutama saat penyusunan laporan keuangan sehingga tidak menimbulkan kecurangan.

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Harapan dari penelitian ini yaitu dapat menjadi tambahan referensi untuk riset dengan tema yang sama di masa depan melihat minimnya referensi yang sesuai dan spesifik dengan tema ini serta dapat menjadi referensi bagi perusahaan, investor, dan calon investor.